**KOMPETENSI ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI
KONVENSIONAL YANG MEMBERIKAN FASILITAS
PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PUTUSAN
MA NOMOR : 608 K/PDT/2021)**

**Ruth Naola Marissa Purba¹, Burhan Sidabariba², Mulhadi³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: ¹ruthpurbalfc@gmail.com, ²bsidabariba@gmail.com, ³mulhadiusu@gmail.com

Abstract: *Using financing facilities with the principles of Islamic law is a consumer's right from a financing institution. Therefore, the emergence of laws and regulations that regulate financing facilities can help the public in determining the financing facilities they want. The research method used in this writing is normative juridical research. The forms of research approach used in this research are the statutory approach and the case approach. Data sources in this research include primary, secondary legal materials and non-legal materials using library data collection techniques. To analyze all the legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. The absolute competence of the Religious Courts is only to adjudicate sharia economic cases based on "sharia economics" which are fully regulated in the explanation of Article 49 letter (i) of the Religious Courts Law and the MUI DSN Fatwa on sharia financial institutions and the MUI DSN Fatwa on murabahah financing. Likewise, financial institutions which in the research are financing companies with conventional cooperative legal entities, are expected not to commit unlawful acts such as disbursing murabahah financing which is not within their rights as regulated in statutory regulations.*

Keywords: *Disputes, Conventional Cooperatives, Financing, Murabahah.*

Abstrak: Menggunakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam merupakan hak seorang konsumen dari lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, munculnya undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur fasilitas pembiayaan dapat membantu masyarakat dalam menentukan fasilitas pembiayaan yang diinginkannya. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya mengadili perkara ekonomi syariah yang berdasarkan “ekonomi syariah” yang diatur sepenuhnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama dan Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah maupun Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah. Sama halnya dengan lembaga keuangan yang dalam penelitian adalah perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional, diharapkan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti menyalurkan pembiayaan murabahah yang bukan menjadi haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Sengketa, Koperasi Konvensional, Pembiayaan, Murabahah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia mendorong masyarakat mengembangkan usaha yang dikelolanya dengan memanfaatkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan yaitu berupa fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat berupa pinjaman dana ataupun pengadaan barang sering disebut sebagai lembaga pembiayaan.

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat Perpres LP).

Ketentuan Pasal 1 butir (1) Perpres LP menyebut Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 2 Perpres LP menyebutkan Lembaga Pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura; dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK), maka untuk setiap pendirian perusahaan, perizinan, pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan di Indonesia diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 28/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK PUKPP). Maka setiap kegiatan fasilitas pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan diawasi sepenuhnya oleh OJK.

Berkaitan dengan fasilitas pembiayaan tersebut pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian. Perjanjian

pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Pasal 15 ayat (1) POJK No. 29 Tahun 2014 Tentang Usaha Penyelenggaraan Pembiayaan, seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis.

Putusan MA No. 608 K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021, Majelis Hakim Agung mengadili suatu perkara yang melibatkan perusahaan pembiayaan berbadan hukum Koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yang menggunakan pembiayaan murabahah dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada anggotanya namun diketahui bahwa KSP Sahabat Mitra Sejati bukanlah perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi syariah yang berhak menggunakan pembiayaan murabahah.

Materi gugatan dalam Putusan MA No. 608 K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021 juncto Putusan No. 49/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 22 April 2020 juncto Putusan No. 76/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 21 November 2019 adalah Elmi Kalsum Simatupang sebagai Penggugat yang dalam hal ini menerima fasilitas pembiayaan sahabat mikro murabahah sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 dari KSP Sahabat Mitra Sejati dengan jaminan SHM No. 3065 miliknya, namun karena mengalami penunggakan pembayaran, maka KSP Sahabat Mitra Sejati melakukan pelelangan terhadap rumah Penggugat namun pelelangan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat.

Penggugat yang keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KSP Sahabat Mitra Sejati, yang pada pokok gugatannya memohon penundaan eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan dalam SHM No. 3065 miliknya, memohon lelang yang dilaksanakan KSP Sahabat Mitra Sejati sebagai Tergugat I melalui KPKNL Pematangsiantar sebagai Tergugat II yang

dimenangkan Ilham Fauzi sebagai Tergugat III menjadi pemenang lelang terhadap tanah dan bangunan dalam SHM No. 3065 batal demi hukum dan Penggugat memohon untuk dapat melakukan restrukturisasi atas Fasilitas Kredit Pembiayaan Mikro Murabahah yang diterimanya dari KSP Sahabat Mitra Sejati.

Hakim tingkat pertama mengabulkan sebahagian gugatan tersebut dan tergugat I yaitu KSP Sahabat Mitra Sejati yang keberatan pada putusan tingkat pertama mengajukan banding, dan hakim tingkat banding memutus gugatan dengan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Penggugat yang keberatan pada putusan hakim tingkat banding kemudian mengajukan kasasi yang kemudian pada tingkat kasasi dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa karena bentuk perjanjiannya Akad Pembiayaan Sahabat Mikro Murabahah maka secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Syariah.

Meskipun akad pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip syariah, namun oleh karena KSP Sahabat Mitra Sejati bukan pembiayaan berbadan hukum koperasi syariah maka Pengadilan Syariah tidak berhak mengadili sengketa perusahaan pembiayaan yang tidak termasuk dalam koperasi jasa keuangan syariah maupun unit jasa keuangan syariah. Diketahui praktek fasilitas pembiayaan tersebut masih berlanjut hingga saat penulisan penelitian ini. Praktek pembiayaan ini tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah merugikan hak-hak konsumen karena ketidaktahuannya tentang fasilitas pembiayaan yang diterimanya menyetujui perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat

kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan majelis hakim agung mengenai yuridiksi (kompetensi) absolut atas sengketa perusahaan pembiayaan yang tidak termasuk dalam koperasi jasa keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut atas “Kompetensi Absolut Penyelesaian Sengketa Koperasi Konvensional Yang Memberikan Fasilitas Pembiayaan Murabahah” (Studi Putusan MA No. 608 K /Pdt/2021 Tanggal 21 April 2021)”.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini sangat penting dalam aspek segi ilmu pengetahuan, ekonomi dan hukum dalam masyarakat, antara lain: Untuk memberi pengetahuan baru terhadap Hakim dan Praktisi Hukum lainnya dan membantu meningkatkan profesionalisme, objektivitas, dan ketelitian dalam proses pengambilan keputusan, Memberi perlindungan hukum terhadap konsumen pembiayaan dari praktek-praktek fasilitas pembiayaan yang tidak transparan akan bentuk-bentuk perjanjian dalam fasilitas pembiayaan yang digunakan, Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan untuk mencegah agar kasus-kasus yang sama tidak terjadi di masa depan, Mendorong pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga-lembaga pembiayaan yang banyak digunakan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atau merasa tertipu.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum dengan teknik pengumpulan

data kepustakaan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum terhadap eksistensi perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional yang menyalurkan pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 bentuk hukum perusahaan pembiayaan yang termasuk di dalam lembaga pembiayaan harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, sama halnya dengan yang tercantum dalam POJK No. 28/Pojk.05/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa kelembagaan perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance) dapat didirikan dengan badan hukum PT dan Koperasi. UU Perkoperasian tidak membatasi kegiatan usaha koperasi, sehingga koperasi dapat menjalankan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Agar tidak menyalahi ketentuan UU Perkoperasian dan untuk menguatkan kedudukannya, koperasi yang mengelola dana kepada non anggota dapat mendirikan lembaga keuangan berupa perusahaan pembiayaan dengan mengajukan izin usaha di bidang pembiayaan ke OJK.

Di dalam aktualitasnya koperasi yang bergerak di jasa keuangan sebagai perusahaan pembiayaan dibagi dalam dua jenis, yaitu Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS). Koperasi konvensional adalah badan usaha koperasi yang dikenal sekarang yaitu badan usaha koperasi yang didirikan oleh anggota atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. UU Perkoperasian hanya mengatur mengenai koperasi yang sifatnya konvensional.

Koperasi Syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional.

Dalam koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam dalam setiap kegiatan usahanya. Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS dan UJKS. KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Koperasi Syariah merupakan lembaga yang secara operasional tunduk pada prinsip-prinsip syariah, dan secara konsep Koperasi Syariah merupakan gabungan antara prinsip-prinsip perkoperasian dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Koperasi Syariah secara kelembagaan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan merupakan bagian dari lembaga pembiayaan mikro (microfinance).

Perbedaan mendasar antara koperasi syariah dan konvensional adalah dalam hal pengawasan. Koperasi konvensional hanya memiliki pengawasan kinerja, sedangkan koperasi syariah memiliki pengawasan kinerja dan juga pengawasan syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi menaati syariah Islam.

Pembiayaan murabahah adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan lembaga pembiayaan dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh USPPS. dan USPPS. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir (1) Permenkop UKM No.16/PER/M/KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yang berbunyi: Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi.

Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu UU Perkoperasian. Koperasi sebagai suatu

usaha berbadan hukum harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar koperasi yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Membahas mengenai akibat hukum tidak terlepas dari lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Menurut R. Soeroso akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Setiap perbuatan melawan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi si pelaku.

Menteri Koperasi dan UKM berwenang membubarkan koperasi, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk pejabat. Yang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk membubarkan koperasi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 25 Tahun 1992 dan Pasal 3 PP No. 17 tahun 1994 serta Pasal 43 Permenkop UKM No.9 Tahun 2018, yaitu: Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi bersangkutan; Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Penelitian ini juga telah melakukan permohonan wawancara terhadap Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, dan menurut Ibu Dwiki, yang mewakili kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi tidak lagi diawasi oleh OJK melainkan dibawah naungan Kementrian Koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas pemerintah telah memberi aturan tersendiri untuk koperasi, maka pembiayaan murabahah yang disalurkan perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional merupakan perbuatan melawan hukum, karena

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama melanggar prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam UU Perkoperasian dan Penyelenggaraan pembiayaannya. Akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi tersebut adalah koperasi dapat dibubarkan.

Penyelesaian sengketa terhadap perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional yang menyalurkan pembiayaan murabahah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah : 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan). Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberi keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Suatu pembiayaan yang didasari dengan perjanjian oleh pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen dapat menimbulkan sengketa. Apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan, maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen ini memberi penegasan konsumen berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha dengan memilih forum penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.

Interaksi antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan, kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Dalam bab I telah dijelaskan bahwa Lembaga keuangan yang menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat

berupa pinjaman dana ataupun pengadaan barang sering disebut sebagai lembaga pembiayaan.

Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, merupakan jalur terakhir yang biasanya ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini disebabkan karena proses pengadilan sejak masuknya gugatan sampai dengan putusan dianggap membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya jalur litigasi akan ditempuh oleh konsumen apabila telah gagal dalam menyelesaikan sengketa di non-litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, yaitu dari pihak yang dirugikan (penggugat) kepada pihak yang menimbulkan kerugian (tergugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya gugatan diajukan ke pengadilan negeri di mana tergugat bertempat tinggal (actor sequitur forum rei).

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan melakukan kegiatan pembiayaan yang merupakan bagian dari badan usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi berada di bawah pengawasan OJK karena bentuk usahanya adalah fasilitas pembiayaannya.

Penyelesaian sengketa yang timbul melalui jalur di luar pengadilan dilakukan melalui upaya-upaya yang sah yang tidak menggunakan pendekatan hukum secara legal formil untuk merundingkan penyelesaian. Lebih mengedepankan ukuran kepatutan dan moral. Menurut UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat beberapa alternatif sarana penyelesaian sengketa yaitu dapat melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.

OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang LAPS SJK, yang merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, yang mana atas kesepakatan

bersama para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan LAPS SJK untuk penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian para ahli/pendapat mengikat, arbitrase.

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunannasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam.

Sebagian besar kontrak yang dirancang oleh lembaga keuangan syariah tidak selalu berjalan mulus, yang berpotensi menimbulkan komplikasi hukum, seperti gagalnya perjanjian dan timbulnya sengketa di kemudian hari. Ketika terjadi perselisihan, para pihak dapat memilih antara litigasi dan non-litigasi. Jika non-litigasi tidak berhasil, kedua belah pihak akan dipaksa menyelesaikan sengketa melalui litigasi. Setiap perusahaan pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas dan perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Pembiayaan murabahah hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagaimana diatur dalam POJK No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Akad pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah diatur sepenuhnya oleh DSN-MUI dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Setelah memberi pengertian perbedaan perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional dan perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi syariah, diketahui bahwa perusahaan pembiayaan badan hukum

koperasi konvensional tidak dapat menyalurkan fasilitas pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu akad pembiayaan dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika dalam prakteknya diketahui bahwa adanya satu perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional yang menyalurkan pembiayaan dengan fasilitas akad pembiayaan murabahah, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Dengan alasan hukumnya bahwa perusahaan pembiayaan konvensional tersebut tidak terdaftar sebagai perusahaan pembiayaan syariah yang diatur sepenuhnya oleh DSN-MUI.

Apabila terjadi sengketa antara perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional yang menyalurkan pembiayaan murabahah dengan konsumennya, maka yang diberlakukan adalah penyelesaian sengketa via pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang dimaksud disini adalah Pengadilan Negeri. Dengan pengertian bahwa pembiayaan dengan akad murabahah yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional tersebut dianggap tidak sah, karena perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional tidak berhak memberi fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah yakni pembiayaan murabahah.

Penerapan hukum tentang kompetensi absolut dalam sengketa yang melibatkan perusahaan pembiayaan koperasi konvensional yang menyalurkan pembiayaan murabahah dalam Putusan MA No. 608 K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021

Dalam perkara Putusan MA No. 608 K/Pdt/2021 Tanggal 21 April 2021 Juncto. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 76/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 21

November 2019 antara Elmi Kalsum Simatupang sebagai Penggugat melawan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Pematangsiantar sebagai Tergugat I yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pelaksanaan lelang terhadap jaminan hutang milik Penggugat. Penggugat menganggap lelang tersebut yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah dan bangunan diatasnya dalam SHM No. 3065 milik Elmi Kalsum Simatupang sebagai Penggugat dianggap tidak sah karena tidak melalui prosedur pelelangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan PMH yang diajukan kuasa hukum dari Penggugat Elmi Kalsum yaitu Advokat/Pengacara dari LBH Siantar-Simalungun adalah di muka Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Pokok materi gugatan penggugat di tingkat pertama yang diajukan di muka Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang pada pokoknya dalam petitum (tuntutan) adalah: 1. Menyatakan batal atau tidak sah lelang yang dilaksanakan oleh tergugat I (KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Pematangsiantar) melalui tergugat II (KPKNL Pematangsiantar) terhadap tanah dan bangunan SHM No.3065 a.n Dokterandus Erwinsyah milik dari penggugat.2. Menyatakan batal atau tidak sah surat-surat yang timbul atau terbit akibat dari lelang yang dilaksanakan oleh tergugat I (KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Pematangsiantar) melalui Tergugat II (KPKNL Pematangsiantar) terhadap tanah dan bangunan SHM No. 3065 a.n Dokterandus Erwinsyah milik dari penggugat.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus

kasus. Pertimbangan hakim dalam suatu perkara di muka pengadilan akan menghasilkan putusan hakim.

Salah satu putusan hakim yang dalam pertimbangan hakim dapat dianggap kurangnya penguasaan bidang ilmu pengetahuan hukum adalah pertimbangan hakim agung dalam Putusan MA No. 608 K/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021.

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim agung yang memutuskan bahwa pembiayaan sahabat mikro murabahah yang diberikan perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional merupakan kewenangan pengadilan syariah adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena tidak memiliki kepastian hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional tidak diperkenankan atau tidak berhak menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan OJK sebagai lembaga yang berhak mengawasi setiap pendirian dan penyelenggaraan perusahaan pembiayaan, baik perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional dan perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi syariah telah mengeluarkan beberapa aturan untuk mengatur perbedaan fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah.

Pertimbangan hakim agung dalam Putusan MA No. 608 K/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021 tentang kewenangan absolut dalam perkara tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa sengketa perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional yang mengeluarkan akad pembiayaan murabahah adalah kewenangan pengadilan syariah yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama. Kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya mengadili perkara ekonomi syariah yang berdasarkan “ekonomi syariah” yang

diatur sepenuhnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama dan Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah maupun Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa pertimbangan hakim agung yang memutuskan perkara antara Elmi Kalsum Simatupang sebagai Penggugat melawan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Pematangsiantar sebagai Tergugat I adalah merupakan kewenangan Pengadilan Syariah (Pengadilan Agama) hanya karena akad pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSP Sahabat Mitra Sejati, yang merupakan perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim agung tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru.

Upaya hukum Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat diajukan untuk dapat diajukan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gwsjde*).

Pengajuan upaya hukum PK perkara perdata memerlukan waktu yang lama dalam proses persidangannya, pemohon PK harus menemukan *novum* baru untuk dapat memajukan upaya hukum PK, memerlukan biaya bagi pihak yang berperkara dan memerlukan waktu yang lama menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung sebagai konstitusi tertinggi yang dapat memutuskan perkara.

Putusan hakim dalam Putusan MA No. 608 K/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021 yang dalam pertimbangannya adalah pertimbangan yang keliru, menimbulkan masalah baru bagi pihak yang berkonflik, dimana Elmi Kalsum Simatupang sebagai penggugat harus menerima eksekusi terhadap hak tanggungan yang diajukan oleh KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Pematangsiantar, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Apabila putusan hakim menimbulkan ketidakjelasan pada pihak yang berperkara, maka kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Dengan alasan kredibilitas hakim yang dianggap meragukan. Meningkatnya jumlah perkara perdata di tingkat kasasi, menunjukkan banyaknya ketidakpuasan para pihak yang berperkara di tingkat pertama maupun tingkat banding. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara MA Nomor 608 K/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021, adalah salah satu putusan yang menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang bersengketa. Dimana putusan tersebut sama sekali tidak dapat dijalankan.
- 2 Sengketa ekonomi perusahaan pembiayaan badan hukum koperasi konvensional dengan jalur litigasi hanya merupakan wewenang pengadilan negeri. Apabila dalam prakteknya diketahui perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional menyalurkan produk pembiayaan syariah, maka penyelesaian sengketa jalur litigasi tersebut merupakan wewenang pengadilan negeri. Pengadilan Agama tidak berhak mengadili perkara perusahaan pembiayaan konvensional, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama dan Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah maupun Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah.
- 3 Pertimbangan hakim agung dalam Putusan MA No. 608 K/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021 tentang kewenangan absolut dalam perkara tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa sengketa perusahaan pembiayaan berbadan

hukum koperasi konvensional yang mengeluarkan akad pembiayaan murabahah adalah kewenangan pengadilan syariah yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama. Kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya mengadili perkara ekonomi syariah yang berdasarkan “ekonomi syariah” yang diatur sepenuhnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama dan Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah maupun Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azza, Nur. Dkk. 2022 Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, Vol. 6, No. 2.
- Chrisdanty, Febry. 2020. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol.11, No.2.
- Fitrianto, Mukhammad Ginanjar, Dkk. 2023. Perlindungan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Terkait Sengketa Klaim Jaminan Fidusia Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Justitia, Vol. 6, No.2.
- Haikal. Jenggis Khan. 2023. Analisis Pertimbangan Hakim. Banyumas : Amerta Media.
- Hidayat, Wahyu. (2024). Koperasi Syariah, Indramayu: Adanu Abimata. <https://ojk.go.id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>, diakses pada tanggal 17 November 2024.
- <https://sef.feb.ugm.ac.id/ulik-potensi-koperasi-syariah-mulai-dari-rumah-tangga-sampai-ekonomi-negara/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

-
- Imaniyati, Neni Sri, Dkk. 2021. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Depok: Rajawali Pers.*
- Indriani, Yuanita. 2021. *Strategi Menciptakan Keunggulan Koperasi, Jurnal Ilmiah Abdimas , Vol.4, No.2.*
- Jamil, Abdul, Dkk. 2021. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata Tema: Hukum dan Prinsip Syariah. Yogyakarta: FH UII Press.*
- Mukharom, Dkk. 2024. *Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Indo Global Mandiri, Vol. 4 , No. 1.*
- Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor. 2023. *Penyelesaian Sengketa Penarikan Objek Leasing Secara Paksa. Jakarta Selatan: Damera Press.*
- Rahardjo, F.X. Joniono. 2024. *Koperasi (Non Syariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Wahyuni, Titis 2020. *Literasi Akuntansi Untuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah, Jakarta : Salemba Empat.*
- Wartoyo, 2024. *Koperasi Syariah Berbasis Mesjid. Indramayu:Adanu Abimata.*
- Wijayanti, Riska. 2022. *Penyusunan Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah. Banyumas : Wawasan Ilmu.*